



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS GADJAH MADA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : BAMBANG RETNOAJI
2. Jabatan : WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN
3. NHK : 979553

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **2.101.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/120 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 465.000.000
2. Tanah Seluas 481 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 986.000.000
3. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 440.000.000
4. Tanah Seluas 100 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **238.000.000**

1. MOTOR, YAMAHA BBP A/T SOLO Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000
2. MOTOR, YAMAHA B9T M/T. SOLO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 42.000.000
3. MOTOR, YAMAHA B6II A/T SOLO Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 21.000.000
4. MOTOR, YAMAHA A/T SOLO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
5. MOBIL, NISSAN MINIBUS Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000



6. MOTOR, VIAR SCOOTER Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp.
10.000.000
7. MOTOR, YAMAHA BPT/AT/SOLO Tahun 2024, HASIL SENDIRI
Rp. 65.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 17.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 195.931.915

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 2.551.931.915

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.551.931.915

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.